



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAK DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
 - b. bahwa Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) telah memenuhi syarat sebagai lembaga amil zakat skala nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan menteri agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.**
- KESATU** : Menetapkan Pemberian Izin Kepada yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Gedung PBNU Lt. 2, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta.
- KEDUA** : LAZIS NU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZIS NU berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setoran zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan;
- e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZIS NU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada LAZIS NU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN